



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

2024

PANGKALAN PSDKP BITUNG

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance* di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka perbaikan capaian kinerja ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan disampaikan kepada pimpinan.

Bitung, 17 Juli 2024  
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber  
Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



**Kurniawan, S.T., M.Si**  
NIP. 190509302001121001

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Pangkalan PSDKP Bitung menetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebanyak 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja. Hasil pengukuran pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 109,83% dengan kategori "baik". Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dinilai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 15 (lima belas) dari 26 (dua puluh enam) indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja dengan nilai capaian 110–120 kategori istimewa;
2. Sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja dengan nilai capaian 90 – <110 kategori baik; dan
3. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja dengan nilai capaian 70 - <90 kategori cukup.

Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tidak terlepas dari dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu Operasi Armada Kapal Pengawas dan Speedboat, Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko bidang kelautan dan perikanan, serta penanganan pelanggaran dan saksi administratif bidang kelautan dan perikanan.

Pagu alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2024 pada Triwulan II terdapat perubahan akibat proses revisi anggaran semula Rp55.883.290.000 menjadi Rp54.645.190.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.439.711.395 atau 35.57%.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	3
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR TABEL .....	5
DAFTAR GAMBAR .....	7
I. PENDAHULUAN .....	8
A. LATAR BELAKANG .....	8
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	8
C. ISU STRATEGIS .....	9
D. DATA UMUM ORGANISASI .....	10
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	13
II. PERENCANAAN KINERJA .....	14
A. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP 2020–2024 .....	14
B. PERJANJIAN KINERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG TAHUN 2024 .....	16
C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	18
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	19
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	21
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	65
IV. PENUTUP .....	66
A. KESIMPULAN .....	66
B. SARAN .....	66
LAMPIRAN .....	67

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2020–2024 .....	15
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2024 .....	16
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	19
Tabel 4.	Capaian Indikator Kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas.....	22
Tabel 5.	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas.....	24
Tabel 6.	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	25
Tabel 7.	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas .	26
Tabel 8.	Pelaksanaan Operasi Speedboat/RIB/Rubber Boat Pengawas Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	27
Tabel 9.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas .....	28
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan .....	34
Tabel 11.	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	35
Tabel 12.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan .....	36
Tabel 13.	Rekapitulasi pemeriksaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	37
Tabel 14.	Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan.....	39
Tabel 15.	Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	42
Tabel 16.	Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	43
Tabel 17.	Rekapitulasi Tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	44
Tabel 18.	Capaian Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.....	44
Tabel 19.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.....	48

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.....	51
Tabel 21. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2024.....	51
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan.....	53
Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup pangkalan PSDKP Bitung.....	57
Tabel 24. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Per Layanan Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024 .....	58
Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.....	59
Tabel 26. Partisipasi jumlah keaktifan publikasi berita dan informasi Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024 .....	60
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.....	63
Tabel 28. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung s.d. Triwulan II Tahun 2024.....	65

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung .....	11
Gambar 2. Lokasi, Satuan Pengawasan, dan Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung .....	12
Gambar 3. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 .....	19
Gambar 4. Sebaran Armada Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung .....	31
Gambar 5. Program Budaya Kerja Ditjen PSDKP .....	55

# I. PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu Tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan *good governance*.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada Tahun 2024 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari capaian kinerja Tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi.

### C. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:

1. Isu strategis pengawasan sumber daya perikanan, meliputi
  - a) Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi;
  - b) Pemanfaatan sumber perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KI), antara lain: penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (buis dan bom ikan), penggunaan ABK asing, kelengkapan ijin operasi dan penangkapan ikan diluar kewenangan penerbit izin;
  - c) Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove;
  - d) Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut;
  - e) Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi (OIKB) dalam pembudidayaan ikan;
  - f) Belum memiliki PKKPRL terkait pipa pasok air laut;
  - g) Pelaksanaan ekspor dan impor hasil perikanan Indonesia harus sesuai dengan ketentuan internasional dan regional;
  - h) Unit pengolah ikan yang telah beroperasi belum terbit izin SKP, belum memiliki fasilitas IPAL serta dokumen PKPLH; dan
  - i) Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, borax dan bahan berbahaya lainnya dalam produk hasil perikanan.
2. Isu strategis pengawasan sumber daya kelautan, meliputi:
  - a) Pemanfaatan ruang di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT;
  - b) Pemanfaatan ruang di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki perizinan PKKRL;
  - c) Kerusakan ekosistem terumbu karang akibat penambangan karang hias tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang merusak karang seperti bom, racun, buis, dan stroom, serta aktivitas wisata bahari
  - d) Pencemaran perairan pesisir akibat buangan limbah industri perikanan dan non perikanan serta rumah tangga;

- e) Sedimentasi di perairan pesisir akibat kegiatan pertambangan; dan
- f) Penambangan pasir laut tanpa izin.

Selain isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan PSDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan SDM Pengawas Perikanan yang terbatas menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Satwas dan Wilker Pangkalan Pengawas SDKP Bitung perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP di Tahun 2024.

#### **D. DATA UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b) pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d) pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e) pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

**a) Kepala Pangkalan**

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

**b) Kepala Subbagian Umum**

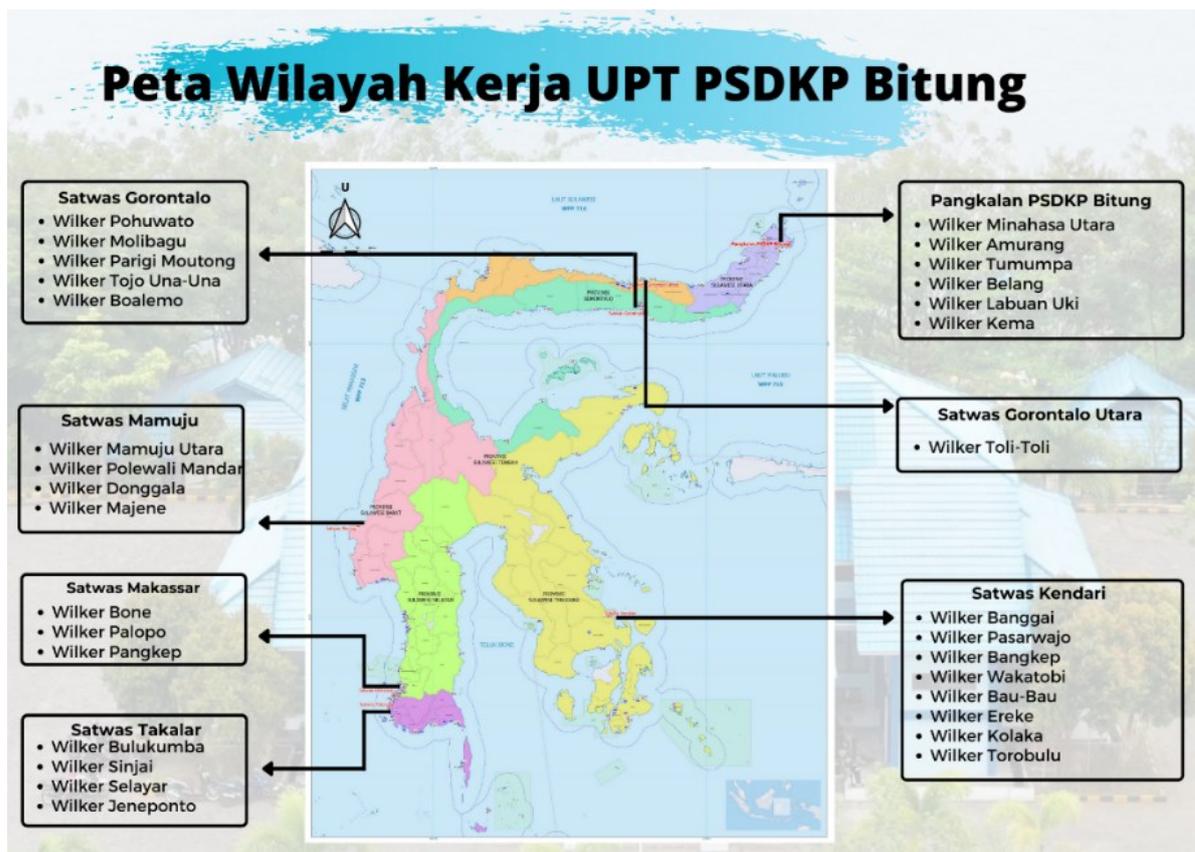
Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

**c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang

keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pada UPT PSDKP dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja dan dipimpin oleh Koordinator Satuan pengawasan. Lokasi, satuan pengawasan, dan wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari 6 Satuan Pengawasan SDKP dan 31 Wilayah Kerja PSDKP tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Lokasi, Satuan Pengawasan, dan Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, isu strategis organisasi, dan data umum Organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
2. BAB II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. BAB III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta realisasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024; dan
4. BAB IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

## II. PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP 2020–2024

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal PSDKP 2020–2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020– 2024.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi KKP 2020–2024 maka telah ditetapkan visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020–2024. Visi Ditjen PSDKP 2020–2024 yaitu “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”. Misi Ditjen PSDKP 2020–2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP maka dirumuskan beberapa tujuan Ditjen PSDKP 2020–2024, yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka disusunlah Sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020–2024 yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP 2020–2024, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2020–2024

No	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggungjawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata Kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

Berdasarkan rumusan Sasaran Program tersebut serta berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga maka Ditjen PSDKP 2020–2024 ikut berkontribusi pada 2 (dua) program KKP, yaitu: (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dan (2) Program Dukungan Manajemen.

## B. PERJANJIAN KINERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; (4) sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan, dan sanksi pegawai.

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN</b>			
SK.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	01 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	02 Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		03 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	91
		04 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	05 Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		06 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
<b>KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>			
SK.4	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	07 Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100
SK.5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	08 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
<b>KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>			

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK.6	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	09	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
<b>KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
SK.7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	10	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		11	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK.8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	12	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
<b>KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN PSDKP</b>				
SK.9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	13	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	75
		14	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
		15	Nilai pengawasan kearsiapan internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	70
		16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	82
		17	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	84
		18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	21
		20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Inovasi)	1
		21	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	80
		22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	94

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		(%)	
		23 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	80
		24 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	80
		25 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	93,76
		26 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	82

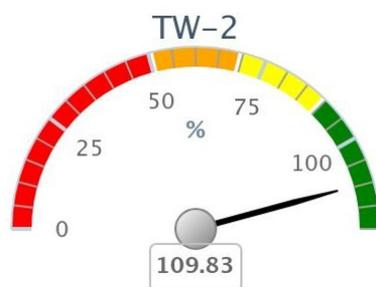
### C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran Kinerja setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda sesuai dengan Manual Indikator Kinerja yang telah disusun. Pengukuran Kinerja dilakukan setiap triwulan dengan membandingkan antara realisasi Kinerja dan Target Kinerja. Data realisasi Indikator Kinerja dan dokumen pendukungnya dimasukkan pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*).

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id)) adalah 109,83%.



Sumber: SAPK ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id))

Gambar 3. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar 109,83%, apabila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 yakni 109,19% maka terdapat kenaikan sebesar 0,64%. Kenaikan tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi pencapaian target output kegiatan sehingga target kinerja dapat tercapai.

Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2024	Target s/d TW II 2024	Capaian s/d TW II 2024	%
<b>SK.1</b>	<b>Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif</b>				<b>120</b>
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80	50	125	120
<b>SK.2</b>	<b>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif</b>				<b>98,51</b>
2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	91	91	96,6	106,15
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	91	91	80,64	88,62

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2024	Target s/d TW II 2024	Capaian s/d TW II 2024	%
4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	100	100	100	100
<b>SK.3</b>	<b>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</b>				
5	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	100	0	
6	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	100	100	0	
<b>SK.4</b>	<b>Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan</b>				
7	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan	100	100	0	
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan</b>				<b>100</b>
8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	100	100	100	100
<b>SK.6</b>	<b>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan</b>				<b>100</b>
9	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	100	100	100	100
<b>SK.7</b>	<b>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas</b>				<b>120</b>
10	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	80	60	80	120
11	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	80	60	80	120
<b>SK.8</b>	<b>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas</b>				<b>120</b>
12	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	93	50	100	120
<b>SK.9</b>	<b>Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP</b>				<b>110,32</b>
13	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	75	0	0	
14	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	100	100	100	100
15	Nilai pengawasan kearsiapan internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	70	0	0	
16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	82	77	79,26	102,94

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2024	Target s/d TW II 2024	Capaian s/d TW II 2024	%
17	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	84	0	0	
18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	80	100	120
19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	21	0	0	
20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung	1	0	0	
21	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	80	80	84,66	105,83
22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	94	94	130	120
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	80	0	0	
24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	80	0	0	
25	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	93,76	83	95,84	115,47
26	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	82	0	0	

**Keterangan:**



Pelaksanaan kegiatan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah dilakukan pengukuran indikator kinerja terhadap 15 (lima belas) dari 26 (dua puluh enam) indikator kinerja yaitu sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja dengan nilai capaian 110–120 kategori istimewa; sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja dengan nilai capaian 90 – <110 kategori baik; dan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja dengan nilai capaian 70 - <90 kategori cukup.

**B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Analisis terhadap pencapaian kinerja di Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Kinerja, bertujuan untuk

menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada Triwulan Tahun sebelumnya. Analisis capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Bitung diuraikan sebagai berikut:

## **SASARAN KEGIATAN 1. TERSELENGGARANYA SISTEM PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF**

### **IKU 1. INDEKS KUALITAS PEMBINAAN POKMASWAS**

Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas merupakan pengukuran untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan Pokmaswas oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Tujuan dari pembinaan Pokmaswas untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan Pokmaswas sebagai komponen perhitungan IKU tersebut yang terdiri dari:

- a) Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b) Pendataan keaktifan Pokmaswas; dan
- c) Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Perhitungan IKU ini dilakukan dalam periode semesteran dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)</i>	50	50	100	50	125	120	81	125	120

Target Kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Triwulan II Tahun 2024 adalah 50 dan capaian realisasi 125 dengan persentase 120%. Jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023, Capaian Kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Triwulan II Tahun 2024 meningkat 20%. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%, namun pola perhitungan yang digunakan pada

capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target kinerja Indeks Kinerja kualitas pembinaan Pokmaswas yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas tersebut diperoleh dengan pemenuhan nilai bobot pada komponen yaitu (a) Rencana kerja kegiatan pembinaan bobot 20% (jadwal pelaksanaan); (b) Pendataan keaktifan Pokmaswas bobot 30% (mengisi form keaktifan Pokmaswas dan database Kelompok Pokmaswas); dan (c) Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pengukuran bobot 50% (laporan pelaksanaan dan dokumentasi). Keberhasilan tercapainya indikator kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Triwulan II Tahun 2024 adalah penyusunan rencana kegiatan pembinaan Pokmaswas telah dilaksanakan dengan baik serta koordinasi aktif dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait database Pokmaswas yang aktif sehingga saat pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pangkalan PSDKP Bitung dapat mengundang dan dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) Pokmaswas. Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung pada 1 (satu) tahun anggaran memiliki target 7 kelompok Pokmaswas yang dibina. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah melakukan kegiatan pembinaan terhadap 20 kelompok Pokmaswas di 5 lokasi pada 3 Provinsi diantaranya Provinsi Sulawesi Barat yaitu Majene tanggal 5 April 2024; Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Pinrang tanggal 26 April 2024, Makassar tanggal 6 Mei 2024, Bone tanggal 14 Mei 2024 dan Propinsi Gorontalo yaitu Gorontalo tanggal 14 Juni 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar Rp700.000.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp430.332.564 dengan presentase realisasi anggaran 61,48%.

## **SASARAN KEGIATAN 2. TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN SDKP YANG EFEKTIF**

### **IKU 2. INDEKS KINERJA OPERASI KAPAL PENGAWAS**

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP

yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b) Cakupan wilayah pengawasan;
- c) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; dan
- d) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Perhitungan indikator kinerja Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)</i>	87,6	100	114,16	91	96,6	106,15	91	96,6	106,15

Target Kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Triwulan II Tahun 2024 adalah 91 dan capaian realisasi 96,6 dengan persentase 106,15%. Jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023, Capaian Kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Triwulan II Tahun 2024 turun 7%. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 106,15%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasai target kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2024.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas sehingga seluruh komponen pembentuk dalam pencapaian indeks kinerja Kapal pengawas terpenuhi sesuai dengan target pada sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, yaitu perencanaan operasi kapal pengawas Kelautan dan Perikanan HIU 02 dan HIU 05 dilakukan dengan cermat, pemenuhan logistik kapal pengawas selama operasi, serta perawatan armada sehingga dalam kondisi siap melaksanakan operasi pengawasan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas pada Pangkalan PSDKP Bitung adalah kegiatan operasi kapal pengawas Kelautan dan Perikanan oleh 2 (dua) armada HIU 02 dan HIU 05. Target kegiatan operasi kapal pengawas pada Tahun 2024 rata-rata 110 (seratus sepuluh) hari operasi. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah tercapai rata-rata 20 (dua puluh) hari operasi dengan jumlah periode operasi sebanyak 2 (dua) periode yang dilaksanakan pada Wilayah Penangkapan Ikan Terukur Zona 3 (WPPNRI 715 & 714) dan Zona 6 (WPPNRI 713) sebagai berikut:

Tabel 6. Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Kapal Pengawas	Periode Operasi	Hari operasi	Kapal Perikanan yang diperiksa		Wilayah Operasi (WPP NRI)	Keterangan
				KII	KIA		
1	HIU 02	I	10	17	-	713, 714	1 (satu) KII diduga melanggar DPI sehingga di Adhock ke Wilker PSDKP Banggai
		II	10	35	-	715	Tidak ditemukan pelanggaran
2	HIU 05	I	10	38	-	715	1 (satu) KII Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan habis masa berlaku sehingga di Adhock ke Pangkalan PSDKP Bitung
		II	10	39	-	714, 715	Tidak ditemukan pelanggaran
<b>Jumlah</b>			<b>40</b>	<b>129</b>			
<b>Rata-rata HO</b>			<b>20</b>				

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp13.483.410.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp3.203.868.936 dengan presentase realisasi anggaran 23,76%.

### IKU 3. INDEKS KINERJA OPERASI SPEEDBOAT PENGAWAS

Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b) Cakupan wilayah pengawasan;
- c) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; dan
- d) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Perhitungan indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)</i>	87,6	97,94	111,8	91	80,64	88,62	91	80,64	88,62

Target Kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Triwulan II Tahun 2024 adalah 91 dan capaian realisasi 80,64 dengan persentase 88,62%. Jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023, Capaian Kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Triwulan II Tahun 2024 turun 20,7%. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 88,62%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2024.

Kegagalan pencapaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas dengan target Triwulan II Tahun 2024, yaitu masih terdapat 4 (unit) unit dari 16 (enam belas) unit armada *Speedboat* Pengawas di beberapa wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung masih dalam kondisi tidak siap operasi sehingga berdampak tidak tercapainya target hari operasi pada Triwulan II yang telah direncanakan. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah monitoring kesiapan armada *speedboat* pengawas serta perawatan armada *speedboat* pengawas dengan pelaksanaan *docking*, perawatan darurat dan pengadaan suku cadang sehingga seluruh armada *speedboat* pengawas

pada Pangkalan PSDKP Bitung siap untuk melaksanakan operasi *speedboat* pengawas terutama SP napoleon 30, RB Pangkep, RB palopo, dan RB Takalar.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi *speedboat* pengawas pada Pangkalan PSDKP Bitung adalah kegiatan operasi oleh 16 (enam belas) unit armada *Speedboat/RIB/Rubber Boat*. Target kegiatan *Speedboat* Pengawas pada Tahun 2024 rata-rata 33 (tiga puluh tiga) hari operasi. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pelaksanaan kegiatan operasi *speedboat* pengawas telah tercapai rata-rata 9 (sembilan) hari operasi sebagai berikut:

Tabel 8. Pelaksanaan Operasi *Speedboat/RIB/Rubber Boat* Pengawas Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Nama Speedboat/RB/RIB	Type	Lokasi	Jumlah Hari Operasi	Jumlah Kapal Diperiksa		Wilayah Operasi (WPP NRI)
					KII	KIA	
1	Albacore 001	12 Meter	Pangkalan Bitung	10	22	-	WPPNRI 715, 716
2	Napoleon 030	12 Meter	Satwas Makassar	-	-	-	-
3	Napoleon 031	12 Meter	Satwas Gorontalo	17	23	-	WPPNRI 715
4	Napoleon 056	12 Meter	Satwas Mamuju	15	32	-	WPPNRI 713
5	Dolphin 003	8 Meter	Wilker Bangkeplut	10	10	-	WPPNRI 715
6	Dolphin 019	8 Meter	Satwas Kendari	10	10	-	WPPNRI 714
7	Dolphin 026	8 Meter	Satwas Gorontalo Utara	18	45	-	WPPNRI 715, 716
8	Searider 06	RIB 8,5 Meter	Pangkalan Bitung	8	18	-	WPPNRI 714, 716
9	RB. Selayar	Rubber Boat	Wilker Selayar	7	14	-	WPPNRI 713
10	RB. Pangkep	Rubber Boat	Wilker Pangkajene Kepulauan	-	-	-	-
11	RB. Palopo	Rubber Boat	Wilker Palopo	-	-	-	-
12	RB. Takalar	Rubber Boat	Satwas Takalar	-	-	-	-
13	RB. Morowali	Rubber Boat	Wilker Morowali	10	8	-	WPPNRI 714
14	RB. Wakatobi	Rubber Boat	Wilker Wakatobi	10	71	-	WPPNRI 714
15	RB. Banggai	Rubber Boat	Wilker Luwuk Banggai	9	9	-	WPPNRI 714
16	Hiu Biru 05	URC	Pangkalan Bitung	24	31	-	WPPNRI 714, 715
<b>Jumlah</b>				<b>148</b>	<b>293</b>		
<b>Rata-rata HO</b>				<b>9</b>			

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas sebesar Rp2.204.442.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp520.600.498 dengan presentase realisasi anggaran sebesar 23,62%.

#### IKU 4. PERSENTASE PEMENUHAN LOGISTIK KAPAL PENGAWAS

Pemenuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP.

Pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP meliputi:

- a. Logistik Kapal, yaitu BBM, Pelumas, Alat Pelayanan; dan
- b. Logistik Personil, yaitu Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api.

Perhitungan IKU ini dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)</i>	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Target Kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Triwulan II Tahun 2024 adalah 100 dan capaian realisasi 100 dengan dengan persentase 100%. Capaian Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 dikarenakan indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditambahkan pada Triwulan IV Tahun 2023. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasai target kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut diperoleh dengan pemenuhan nilai bobot pada komponen yaitu (a) Pemenuhan kebutuhan BBM bobot 30%; (b) Pemenuhan kebutuhan Pelumas bobot 20%; (c) Pemenuhan Bahan Makanan AKP bobot 25%; (d) Pemenuhan kebutuhan Air Bersih bobot 15%; (e) Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan (ATK dan Bahan Komputer) bobot 5%; dan (f) Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api bobot 5% yang telah dipenuhi oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas adalah kapal pengawas kelautan dan perikanan HIU 02 dan HIU 05 telah melaksanakan dan melaporkan seluruh proses kegiatan pemenuhan logistik kapal pengawas yaitu berita

acara penggunaan BBM setiap bulan, laporan penggunaan senjata api, serta surat permohonan pembelian pelumas, surat pengantar kebutuhan air bersih, Natura, alat tulis dan bahan komputer.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas yaitu pemenuhan BBM melalui mekanisme kontraktual dengan PT Pertamina Patra Niaga, pemenuhan pelumas, air bersih, bahan makan AKP (Natura), alat tulis dan bahan komputer yang dilaksanakan melalui pembayaran langsung/LS.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas sebesar Rp13.483.410.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp3.203.868.936 dengan presentase realisasi anggaran 23,76%.

### **SASARAN KEGIATAN 3. TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN SERTA PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP YANG SESUAI KETETUAN**

#### **IKU 5. PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP YANG DISELESAIKAN**

Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah penilaian kemajuan fisik/konstruksi prasarana pengawasan SDKP yang dibangun. Perhitungan capaian indikator atau presentase penyelesaian dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan prestasi kerja penyedia jasa. Penyelesaian fisik/konstruksi prasarana pengawasan SDKP yang dibangun ditargetkan selesai dalam 1 (satu) Tahun anggaran 2024 dengan target capaian kinerja sebesar 100%. Perhitungan indikator kinerja Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Target prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan Tahun 2024 pada Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 4 (empat) unit, yaitu Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP Morowali, Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung, Renovasi Mess Perwira Pangkalan PSDKP Bitung, dan Pembangunan Pos Pengawasan SDKP KALAMO di Konawe. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target indikator kinerja Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah penyelesaian kegiatan perencanaan teknis pembangunan Pos Pengawasan PSDKP Morowali dan

Renovasi Pos Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung serta penandatanganan kontrak untuk 2 (dua) kegiatan pembangunan tersebut pada tanggal 18 Juli 2024. Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan sebesar Rp4.234.062.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp186.073.881 dengan presentase realisasi anggaran 4,39% %.

## **IKU 6. PERSENTASE PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP**

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas bertujuan untuk mempertahankan kapal pengawas agar memenuhi standar kelaiklautan dan kelaikoperasian kapal pengawas serta keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan pelayaran, kegiatan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan. Pemenuhan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP meliputi:

1. Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*)

Perawatan pencegahan merupakan tindakan perawatan kapal yang dilakukan secara terjadwal dan terencana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah teknis yang dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen/peralatan/sistem kapal serta sebagai tindakan/langkah *preventif* agar komponen/peralatan/sistem kapal tersebut tetap berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Pada Tahun 2024 perawatan pencegahan kapal pengawas di Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari Servis Perlengkapan Keselamatan, Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas, Perawatan Rutin Bulanan Speedboat, dan Servis Perlengkapan Navigasi dan Komunikasi.

2. Perawatan prediktif (*predictive maintenance*)

Perawatan prediktif terdiri atas 2 (dua) kegiatan utama yaitu

- a) Pengadaan Suku Cadang

Sistem permesinan yang terdiri dari mesin penggerak utama (*main engine*) dan mesin bantu (*auxiliary engine*), sistem hidraulik, fuel separator, dan perpompaan. Durasi waktu penggantian suku cadang sistem-sistem tersebut dipengaruhi oleh usia pakai suku cadang, jam kerja masing-masing mesin/peralatan dan kualitas bahan bakar (BBM) yang digunakan oleh kapal pengawas dan Speedboat. Dalam rangka menjaga semua sistem dan peralatan yang ada di kapal agar tetap dalam kondisi prima, diperlukan pengadaan suku cadang (*spare parts*) sistem permesinan baik yang bersifat habis pakai (*fast moving*) maupun yang bersifat persediaan (*stock*).

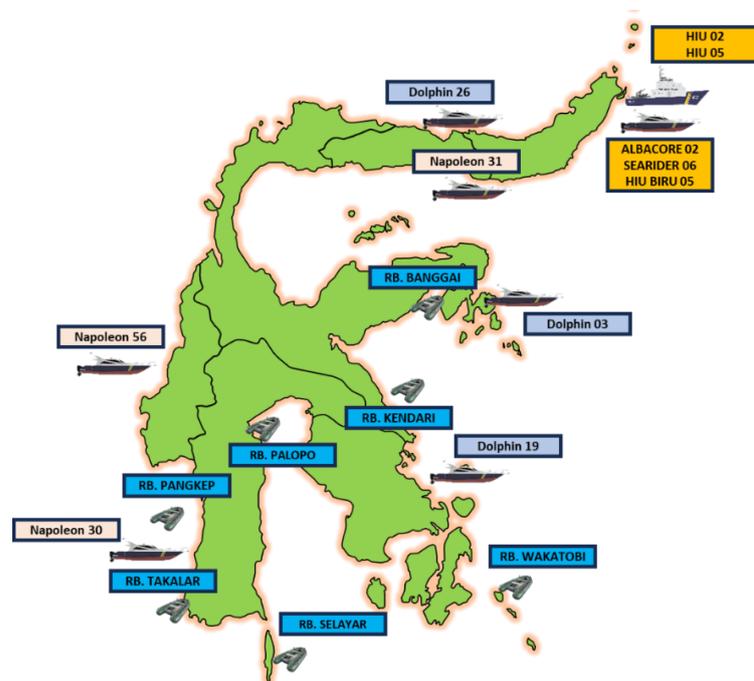
b) Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas

Perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan guna mendukung operasional kapal pengawas. Jenis perlengkapan yang dibutuhkan oleh setiap kapal berbeda-beda sesuai dengan kondisi teknis dan kebutuhan kapal.

3. Perawatan darurat (*breakdown maintenance*)

Perawatan yang dilaksanakan apabila terdapat kerusakan/gangguan teknis yang terjadi secara tidak terduga baik yang disebabkan oleh faktor internal seperti *engine failure* dan *equipment breakdown* maupun faktor eksternal eksternal seperti cuaca buruk dan benturan dengan dermaga atau kapal lain.

Perhitungan capaian indikator kinerja Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.



Gambar 4. Sebaran Armada Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung

Target pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP di Pangkalan PSDKP Bitung yang dilaksanakan terhadap 18 (delapan belas) unit armada. Armada kapal pengawas perikanan yang dimiliki terdiri dari kapal pengawas kelas IV sebanyak 2 (dua) unit yaitu HIU 02 dan HIU 05 serta kapal pengawas kelas V sebanyak 16 (enam belas) unit yaitu 7 (tujuh) unit *speedboat*, 1 (satu) Unit Reaksi Cepat, 1 (satu) unit RIB, dan 7 (tujuh) unit *rubber boat*.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP yaitu penyampaian Laporan Kondisi Teknis (Lapkonis) setiap bulan untuk armada kapal pengawas maupun *speedboat* pengawas sebagai tolak ukur bahwa armada tersebut telah selesai dilakukan perawatan. Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024, indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP sebesar Rp4.751.550.000 dan dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp2.604.952.948 dengan presentase realisasi anggaran 54,82%.

#### **SASARAN KEGIATAN 4. TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI INTELIJEN KELAUTAN**

#### **IKU 7. PERSENTASE PENYELESAIAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI INTELIJEN KELAUTAN**

Intelijen sebagai kegiatan yaitu segala usaha, pekerjaan, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kegiatan intelijen adalah segala usaha yang dilaksanakan secara rutin dan terus menerus berdasarkan tata cara kerja tetap, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Data dan informasi intelijen kelautan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan

ditempuh. Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Target pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 1 (satu) kegiatan. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan adalah pengumpulan Laporan pengamatan/penyurupan/penyusupan/penelitian/penjejakan, Laporan hasil Pulbaket, dan Laporan masyarakat. Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan belum dilakukan pengukuran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan sebesar Rp131.415.000 dan belum terdapat realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

## **SASARAN KEGIATAN 5. TERSELENGGARANYA PENGAWASAN PELAKU USAHA DAN PEMANFAAT SUMBER DAYA KELAUTAN**

### **IKU 8. NILAI KUALITAS PENYELESAIAN PEMERIKSAAN PELAKU USAHA DAN PEMANFAAT SUMBER DAYA KELAUTAN**

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang terdiri dari:

- a. Persiapan, meliputi: membuat jadwal pemeriksaan; berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau rapat persiapan pemeriksaan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha; dan
- c. Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSPDK.

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)</i>	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Target kinerja Indeks Kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Triwulan II Tahun 2024 adalah 100 dan dan capaian realisasi 100 dengan dengan persentase 100%. Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023 dikarenakan perbedaan penilaian indikator kinerja. Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 sebesar 100 telah tercapai 100%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasai target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan adalah kompetensi dan pemahaman Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pengawasan pada objek pengawasan sumber daya kelautan sehingga pemenuhan komponen penilaian indikator kinerja dapat terpenuhi. Selain itu monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan sehingga dapat meminimalisasi resiko kekurangan terhadap pemenuhan penilaian indikator kinerja.

Pencapaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap kepatuhan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan mencakup pengawasan pengelolaan kawasan konservasi, jenis ikan yang dilindungi, pengelolaan ruang laut, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pencemaran perikanan dan non perikanan, dan pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Penilaian indikator kinerja terpenuhi jika dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan, Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengawas perikanan/Polsus PWP3K dan pelaku usaha serta pelaporan pengawasan ke Direktorat PSDK. Target kegiatan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan pada Tahun 2024 sebanyak 118 (seratus delapan belas) pelaku usaha. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Bitung telah melaksanakan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan sebanyak 111 (seratus sebelas) pelaku usaha.

Tabel 11. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Kegiatan Pemeriksaan	Jumlah yang Diperiksa
1	Pengelolaan Kawasan Konservasi	1
2	Jenis Ikan Dilindungi	33
3	Pemanfaatan Ruang Laut	5
4	Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	17
5	Penangkapan Ikan Yang Merusak	24
6	Pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya pada usaha Perikanan dan Non Perikanan	31
<b>TOTAL</b>		<b>111</b>

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan sebesar Rp2.710.000.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp1.207.511.582 dengan presentase realisasi anggaran 44,56%.

## **SASARAN KEGIATAN 6. TERSELENGGARANYA PENGAWASAN PELAKU USAHA DAN PEMANFAAT SUMBER DAYA PERIKANAN**

### **IKU 9. NILAI KUALITAS PENYELESAIAN PEMERIKSAAN PELAKU USAHA DAN PEMANFAAT SUMBER DAYA PERIKANAN**

Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Tujuan pemeriksaan pelaku usaha bidang perikanan untuk menilai kepatuhan pemenuhan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang terdiri dari:

- a. Persiapan, meliputi: membuat jadwal pemeriksaan; berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau rapat persiapan pemeriksaan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha; dan
- c. Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSPD.

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)</i>	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Target kinerja Indeks Kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Triwulan II Tahun 2024 adalah 100 dan capaian realisasi 100 dengan dengan persentase 100%. Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 dikarenakan perbedaan penilaian indikator kinerja. Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 sebesar 100 telah tercapai 100%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan adalah kompetensi dan pemahaman Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha dan produk pada perizinan berusaha berbasis resiko sektor perikanan sehingga pemenuhan komponen penilaian indikator kinerja dapat terpenuhi. Selaian itu monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan sehingga dapat meminimalisasi resiko kekurangan terhadap pemenuhan penilaian indikator kinerja.

Pencapaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan usaha dan produk oleh Pengawas Perikanan terhadap pelaku usaha penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan berdasarkan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan yang terdiri dari:

- a. Pengawasan Rutin melalui inspeksi lapangan subsektor Penangkapan Ikan, Pengangkutan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Pengolahan Ikan, dan Pemasaran Ikan yang wajib dilengkapi dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- b. Pengawasan lainnya meliputi pengawasan pelaku usaha kampung budidaya, penangkapn Lobter Kepiting dan Rajungan (LKR), serta pelaku usaha tidak berizin/illegal

Penilaian indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan terpenuhi apabila dilengkapi dengan surat pemberitahuan ke pelaku usaha, surat tugas, Daftar Pertanyaan, Hasil Pengawasan, Form Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha serta Laporan Kegiatan pengawasan yang diinput ke sistem pelaporan Direktorat PPSDP. Target kegiatan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan pada Tahun 2024 sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kode proyek sesuai dengan kode KBLI pada Perizinan Berusaha yang dimiliki. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Bitung telah melaksanakan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan sebanyak 118 (Seratus Delapan Belas) kode proyek.

Tabel 13. Rekapitulasi pemeriksaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Subsektor yang Diperiksa	Jumlah yang Diperiksa
1	Penangkapan ikan	67
2	Pengangkutan ikan	3
3	Pembudidayaan ikan	35
4	Pengolahan ikan	2
5	Pemasaran ikan	1
6	Kampung Budidaya	10
<b>TOTAL</b>		<b>118</b>

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan sebesar Rp1.831.000.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 868.501.117 dengan presentase realisasi anggaran 47,43%.

## **SASARAN KEGIATAN 7. TERSELENGGARANYA PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG TUNTAS**

### **IKU 10. INDEKS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran administrasi atau Ketentuan UU yang bersifat administratif, biasanya terkait perizinan (pemenuhan persyaratan perizinan) dan dilaksanakan oleh pejabat/badan Pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin. Pengenaan sanksi administratif sektor perikanan menjadi sebuah langkah strategis dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain pengenaan sanksi administrasi untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan berdasarkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri atas: (a) peringatan/teguran tertulis; (b) paksaan pemerintah; (c) denda administratif; (d) pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau (e) pencabutan Perizinan Berusaha.

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang. Kewenangan UPT PSDKP dalam pengenaan sanksi administratif yaitu:

- a. Pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1) atau Paksaan Pemerintah; dan
- b. Pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan

nilai posisi akhir. Selain itu terdapat pertimbangan dalam pemenuhan capaian indikator kinerja bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)</i>	-	-	-	60	80	120	80	80	120

Target Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 adalah 60 dan capaian realisasi 80 dengan persentase capaian kinerja 120%. Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 dikarenakan perbedaan penilaian indikator kinerja. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai 120%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan adalah kompetensi pengawas perikanan, Polsus PWP3K, PPNS Perikanan, dan Awak Kapal Perikanan yang cermat melaksanakan pengawasan dan menganalisis laporan hasil pengawasan yang diduga terdapat pelanggaran, penyelesaian proses pengenaan sanksi administratif serta berkoordinasi dengan Direktorat PP, Dirketorat PPSDP, dan Direktorat PPSDK dalam pelaksanaan ekspose internal dan eksternal hingga penyelesaian pengenaan sanksi administrasi terbit.

Pencapaian indikator kinerja Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan proses penanganan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dari laporan hasil pengawasan baik dari Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, dan Kapal Pengawas

Kelautan dan Perikanan. Target kegiatan pengenaan sanksi administratif pada Tahun 2024 sebanyak 20 (dua puluh) perkara. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Bitung telah melakukan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan sebanyak 9 (sembilan) perkara sebagai berikut:

- a. Pelanggaran terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebanyak 2 (dua) perkara, yaitu
  - KM Inka Mina 923 pelanggaran melakukan penangkapan ikan tidak sesuai daerah/jalur penangkapan ikan pada Perizian Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I, berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.398/PSDKPLan.5/PW.150/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
  - KM Rifael dengan pelanggaran melakukan penangkapan tidak sesuai daerah/jalur penangkapan ikan pada Perizian Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I, berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.774/PSDKPLan.5/PW.150/II/2024 tanggal 23 Februari 2024.
- b. Pelanggaran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebanyak 1 (satu) perkara, yaitu
  - PT Boddia Galesong Jaya pelanggaran PKKPRL dan reklamasi sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I dan masih dalam proses pengenaan denda administratif.
- c. Pelanggaran berizinan berusaha sebanyak 6 (enam) perkara, yaitu
  - KM Normayanti 01 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan telah habis masa berlaku sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2034/PSDKPLan.5/PW.340/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2047/PSDKPLan.5/PW.110/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, dan denda administratif sebesar Rp13.573.245 berdasarkan surat Direktorat Jenderal PSDKP Nomor B.290/DJPSDKP/PW.150/V/2024 tanggal 15 Mei 2024.
  - KM Sagitarius Rik Rif pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan Pelanggaran tidak sesuai dengan daerah penangkapan dan jalur

penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2559/PSDKPLan.5/ PW.110/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2600/PSDKPLan.5/PW.110/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, dan denda administratif sebesar Rp53.760.000 berdasarkan surat Direktorat Jenderal PSDKP Nomor B.413/DJPSDKP/PW.110/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024

- KM Samudra pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan Pelanggaran tidak sesuai dengan daerah penangkapan dan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2367/PSDKPLan.5/TU.210/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2372/PSDKPLan.5/PW.110/VI/2024 tanggal 28 Mei 2024.
- KM Rezky Abadi 05 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan Pelanggaran tidak sesuai dengan daerah penangkapan dan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2641/PSDKPLan.5/PW.110/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2642/PSDKPLan.5/KP.440/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024.
- KM Wahyu Jaya Herlang pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan Pelanggaran tidak sesuai dengan daerah penangkapan dan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2318/PSDKPLan.5/PW.110/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2372/PSDKPLan.5/PW.110/VI/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- KM Rahmatullah pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan Pelanggaran tidak sesuai dengan daerah penangkapan dan jalur

penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2643/PSDKPLan.5/PW.110/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2644/PSDKPLan.5/KP.440/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024.

Tabel 15. Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Jenis Pelanggaran	Pengenaan Sanksi Administratif			
		Dalam Proses	Peringatan/ Teguran Tertulis	Paksaan Pemerintah	Denda Administratif
1	SPKP	-	2	-	-
2	Pemanfaatan Ruang Laut	-	1	-	-
3	Perijinan berusaha	-	-	4	2
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp526.700.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 192.003.083 dengan presentase realisasi anggaran 36,45%.

## **IKU 11. INDEKS PEMERIKSAAN HASIL ANALISIS PEMANTAUAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a) Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b) Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau c) Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar atau menjadi perhatian publik. Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)</i>	-	-	-	60	80	120	80	80	120

Target Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 adalah 60 dan capaian realisasi 80 dengan persentase capaian kinerja 120%. Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator Triwulan II Tahun 2023 dikarenakan perbedaan penilaian indikator kinerja. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai 120%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasai target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2024.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu kompetensi Pengawas Perikanan dan Petugas RMC (*Regional Monitoring Center*) Pangkalan PSDKP Bitung dalam menganalisis dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pusdal PSDKP Direktorat POA hingga penetapan pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diperoleh dari tindaklanjut penyelesaian jumlah dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh Pusdal Direktorat POA. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran tersebut telah dilakukan pemanggilan dan dilakukan pengambilan keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Bitung menerima sebanyak 41 (empat puluh satu) laporan analisis dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan terhadap daerah penangkapan ikan (DPI) dan jalur penangkapan ikan. Hasil tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan sebagai berikut:

Tabel 17. Rekapitulasi Tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Jenis Dugaan Pelanggaran	Dalam Proses	Tindak Lanjut		
			BAP	Bukan Pelanggaran	Surat Peringatan-1
1	Daerah penangkapan ikan	-	2	11	0
2	Jalur penangkapan ikan	-	20	6	2
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>2</b>

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp526.700.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 192.003.083 dengan presentase realisasi anggaran 36,45%.

## SASARAN KEGIATAN 8. TERSELENGGARANYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKUALITAS

### IKU 12. INDEKS PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir. Selain itu terdapat pertimbangan dalam pemenuhan capaian indikator kinerja bahwa perkara pidana di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak ada perkara atau triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit di akhir bulan perhitungan Triwulan maka target dianggap tercapai.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)</i>	-	-	-	50	100	120	93	100	120

Target Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 50 dan capaian realisasi 100

dengan persentase capaian kinerja 120%. Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator Triwulan II Tahun 2023 dikarenakan perbedaan penilaian indikator kinerja. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai 120%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2024.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dikategorikan selesai apabila berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Bitung menangani sebanyak 5 (lima) perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang telah selesai terdiri dari 2 (dua) perkara Kapal Ikan Asing dan 3 (perkara) penangkapan ikan merusak (*destructive fishing*) sebagai berikut:

- a. Berkas perkara atas nama tersangka Levie E. Cawasa nahkoda FB. LB Jose Maria A-2 bendera negara Filipina yang ditangkap oleh KP ORCA 04 di Perairan Laut Sulawesi (WPPRI 716) pada koordinat 03°19,315'N 121°22,082'E tanggal 27 Februari 2024 pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah RI, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-644/P.1.14/Eku.1/04/2024 tanggal 29 April 2024 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1875/PPNS-Lan.5/PW.410/V/2024 tanggal 2 Mei 2024.
- b. Berkas perkara atas nama tersangka Rex Castaniares Diaz nahkoda FB. Queen Davie bendera negara Filipina yang ditangkap oleh KP BALADEWA 8002 di 4NM dibawah garis batas Perairan ZEEI (Laut Sulawesi) Kepulauan Marore, Kab. Sangihe, Sulawesi Utara pada koordinat 04°40.670'N 124°25.960'E tanggal 07 Maret 2024 pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah RI, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B.489/P.1.14/Eku.1/04/2024 tanggal 1 April 2024 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1959/PPNS-Lan.5/PW.410/V/2024 tanggal 6 Mei 2024.
- c. Berkas perkara atas nama tersangka Turang yang ditangkap oleh URC HIU BIRU 05 di Perairan Manui Kepulauan, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah pada koordinat

03°22.754'N 122°57.839'E tanggal 07 Maret 2024 pelanggaran menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-655/P.1.14/Eku.1/04/2024 Tanggal 29 April 2024 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1878/PPNS-Lan.5/PW.410/V/2024 tanggal 2 Mei 2024.

- d. Berkas perkara atas nama tersangka Arjuna yang ditangkap oleh URC HIU BIRU 05 di Perairan Manui Kepulauan, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah pada koordinat 03°22.754'N 122°57.839'E tanggal 07 Maret 2024 pelanggaran menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-643/P.1.14/Eku.1/04/2024 Tanggal 29 April 2024 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1876/PPNS-Lan.5/PW.410/V/2024 tanggal 2 Mei 2024.
- e. Berkas perkara atas nama tersangka Rangga Geni yang ditangkap oleh URC HIU BIRU 05 di Perairan Manui Kepulauan, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah pada koordinat 03°22.754'N 122°57.839'E tanggal 07 Maret 2024 pelanggaran menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-642/P.1.14/Eku.1/04/2024 Tanggal 29 April 2024 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1877/PPNS-Lan.5/PW.410/V/2024 tanggal 2 Mei 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan sebesar Rp635.300.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp166.659.000 dengan presentase realisasi anggaran 26,23%.

## **SASARAN KEGIATAN 9. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP DITJEN PSDKP**

### **IKM 13. NILAI MINIMAL YANG DIPERSYARATKAN UNTUK PEMBANGUNAN UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas

kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK  $\geq 75$ . Kriteria pemenuhan WBK terdiri dari:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit; dan
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18.50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13.5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5.0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp118.550.000 dan belum terdapat realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

#### **IKM 14. PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN BERBASIS MANAJEMEN RISIKO LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Menurut definisi dalam Peraturan Menteri KP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (SPIP), risiko adalah kemungkinan kejadian dan pengaruh dari ketidakpastian (*uncertainty*) yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Kaitannya dengan SPIP, risiko harus dinilai, dalam artian perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, dan selanjutnya dikelola. Dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah tentunya selalu ada risiko yang akan dihadapi, oleh karena itu risiko perlu dikelola dengan baik menggunakan pendekatan manajemen risiko, yakni proses tata kelola pengendalian risiko yang terencana, proaktif, dan berkelanjutan meliputi penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, dan pelaporan pengendalian risiko, termasuk berbagai

strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan mengurangi dampaknya sampai dengan tujuan tercapai.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan dengan pola perhitungan rata-rata.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024 dari target triwulan sebesar 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024 sama. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 sebesar 100% telah tercapai, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah identifikasi penilaian resiko, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengendalian resiko yang dapat ditimbulkan pada pencapaian kegiatan di masing-masing Tim Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung melakukan pengendalian dan pamantuan dengan pendekatan manajemen risiko periode Triwulan II Tahun 2024 terhadap 14 (empat belas) kegiatan rencana pengendalian resiko pada Pangkalan PSDKP Bitung. Penyusunan laporan SPIP dan MR dilaksanakan setiap Triwulan meliputi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan Manajemen Resiko.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp55.000.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp12.230.785 dengan presentase realisasi anggaran 22,24%.

#### **IKM 15. NILAI PENGAWASAN KEARSIAPAN INTERNAL LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Arsip merupakan salah satu sumber informasi bagi pelaksanaan manajemen baik pada lembaga Pemerintahan maupun lembaga publik dan bisnis. Ketersediaan arsip yang efektif, efisien, lengkap dan berkualitas merupakan tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah hasil audit sistem kearsipan internal unit kearsipan yang diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ.

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp21.000.000 dan belum terdapat realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

## **IKM 16. INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu Instrumen yang digunakan untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN. Pengukuran IP-ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung diukur berdasarkan indikator:

- a. Kualifikasi yaitu tingkat pendidikan ASN sesuai persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki dari aplikasi e-Pegawai KKP;
- b. Kompetensi yaitu keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Struktural), Diklat Fungsional, Diklat 20 JP tahun berjalan, dan/atau Seminar (Workshop, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Sosio Kultural, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis) dari Aplikasi SIASN BKN;
- c. Kinerja yaitu hasil penilaian predikat kinerja kerja ASN dari aplikasi SIASN BKN dan Aplikasi Kinerja BKN; dan
- d. Disiplin atau berkeenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin dari aplikasi e-Pegawai KKP.

Nilai hasil pengukuran IP ASN dikategorikan sebagai berikut: 91–100 (Sangat Tinggi); 81–90 (Tinggi); 71–80 (Sedang); 61–70 (Rendah); 0–60 (Sangat Rendah). Perhitungan capaian indikator kinerja Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan dalam periode semesteran dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	71	77,41	109,03	77	79,26	102,94	82	79,26	96,67

Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024 dari target triwulan sebesar 77 tercapai 79,26 dengan persentase capaian kinerja 102,94%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024 meningkat sebesar 1,85 poin. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 sebesar 96,67%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2024.

Keberhasilan yang mempengaruhi pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah partisipasi aktif pegawai dalam mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara *offline* maupun *online* serta penginputan sertifikat yang telah diperoleh pada myasn.bkn.go.id. Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN salah satunya mengikuti Pelatihan *Massive Open Online Course* (MOOC) melalui *Learning Management System* (LMS) e-Milea yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Aparatur Sukamandi. Jumlah pegawai Pangkalan PSDKP Bitung yang dinilai sebanyak 107 orang PNS.

Tabel 21. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	PANGKALAN PSDKP BITUNG	107	2115	84,6 %	2811	70,28 %	25	83,33 %	5	100 %	79,26	SEDANG

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp150.000.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp36.926.243 dengan presentase realisasi anggaran 24,62%.

## IKM 17. PENILAIAN MANDIRI SAKIP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka menjadi mandat bagi setiap unit kerja di masing-masing instansi untuk melaksanakan penilaian mandiri atas implementasi AKIP di masing-masing unit kerja. Penilaian mandiri implementasi AKIP unit kerja lingkup KKP level II dilaksanakan dengan Mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. sesuai dengan kriteria masing-masing variabel sebagai berikut

- a. Komponen, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- b. Sub Komponen terbagi sesuai gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen; dan
- c. Kriteria adalah gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Perhitungan capaian indikator kinerja kinerja Indeks Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Perhitungan capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan III Tahun 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp222.550.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp56.463.500 dengan presentase realisasi anggaran 25,37%.

### **IKM 18. PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN**

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan merupakan indikator kinerja yang diukur dengan jumlah tindak lanjut terhadap jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun sebelumnya s.d Triwulan III periode berjalan yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)</i>	75	75	100	80	100	120	80	100	120

Capaian indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Triwulan II Tahun 2024 dari target triwulan sebesar 80% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 120%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, capaian Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Triwulan II Tahun 2024 meingkat sebesar 20%. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan

PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 sebesar 120% telah tercapai, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut capaian pada Triwulan IV Tahun 2024.

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini yaitu penyelesaian tindak lanjut terhadap LHP (Audit, Reviu dan Evaluasi) yang harus dilengkapi sesegera mungkin dan tepat penyelesaiannya sesuai dengan yang telah direkomendasikan. LHP yang telah selesai ditindaklanjuti Pangkalan PSDKP sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Pemantauan Pembangunan Pos Pengawasan Satwas SDKP Makasar Pangkalan PSDKP Bitung di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal Nomor R.265/ITJ.2/HP.550/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) rekomendasi yaitu yang telah ditindaklanjuti;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Pemantauan Pembangunan Kapal Pengawas Kelas VI Type Speedboat TA 2023 pada Pangkalan PSDKP Bitung di Galangan Kapal PT Tri Ratna Diesel Lamongan, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal Nomor R.302/ITJ.2/HP.550/X/2023 tanggal 24 November 2023 sebanyak 3 (tiga) rekomendasi yang telah ditindak lanjut; dan
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Hasil *Probity Audit* Pengadaan Kapal Pengawas Kelas VI Tipe *Speedboat* pada Pangkalan PSDKP Bitung Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal Nomor R.265/ITJ.2/HP.550/X/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebanyak 1 (satu) rekomendasi yang telah ditindak lanjut.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar Rp4.289.062.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 198.304.666 dengan presentase realisasi anggaran 4,62%.

## IKM 19. NILAI IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA KERJA

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja dilingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Nilai implementasi budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh komite dan tim budaya kerja Pangkalan PSDKP Bitung menggunakan lembar kerja evaluasi (LKE) pelaksanaan budaya kerja. Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya.



Gambar 5. Program Budaya Kerja Ditjen PSDKP

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Implementasi Budaya Kerja belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Implementasi Budaya Kerja sebesar Rp93.250.000 dan belum terdapat realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

## IKM 20. INOVASI PELAYANAN PUBLIK YANG DITERAPKAN PADA UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG

Inovasi adalah terobosan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria baik bersifat manual, mekanikal maupun memanfaatkan teknologi informasi pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi inovasi dihasilkan menggunakan konsep plan do check action (PDCA) yaitu penggunaan 8 langkah dan 7 alat *quality control* inovasi dinilai tercapai apabila:

1. Dirumuskan dan diselesaikan oleh tim GKT yang ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal PSDKP;
2. Menggunakan konsep PDCA;

3. Menyelesaikan risalah inovasi sesuai format; dan
4. Mengikuti lomba inovasi dan PSDKP Tahun 2024.

Perhitungan capaian indikator kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp93.250.000 dan belum terdapat realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

## **IKM 21. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PUBLIK LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan dan komprehensif atas pendapat masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021. Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan yaitu U1-Persyaratan Layanan; U2-Kemudahan Prosedur; U3-Waktu Penyelesaian; U4-Kesesuaian Biaya; U5-Kesesuaian Produk; U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas; U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas; U8-Layanan Konsultasi; dan U9-Kualitas Isi/Sarana. Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai >88,31 (Sangat Baik); 76,61–88,30 (Baik); 65,00–76,60 (Kurang Baik); dan 25,00–64,99 (Tidak Baik). Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO di Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan setiap triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup pangkalan PSDKP Bitung

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup pangkalan PSDKP Bitung (indeks)</i>	-	-	-	80	84,66	105,83	80	84,66	105,83

Capaian indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024 dari target triwulan sebesar 80 tercapai 84,66 dengan persentase capaian kinerja 105,83%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, capaian Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dikarenakan perbedaan penilaian indikator kinerja. Perbandingan capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup pangkalan PSDKP Bitung dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 sebesar 105,83% telah tercapai, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2024.

Keberhasilan Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah pelayanan prima oleh pengawas perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung kepada pengguna layanan dalam penerbitan SLO dan LVHPI serta pengaturan personil pengawas perikanan yang cukup sehingga pelayanan terlaksana dengan cepat dan tepat. Pelayanan penerbitan SLO menggunakan aplikasi E-PIT dan E-SLO secara *online* sehingga memudahkan pengguna jasa layanan pengajuan permohonan penerbitan SLO.

Pangkalan PSDKP Bitung memiliki 2 (dua) produk layanan publik yaitu penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan penilaian (LVHPI). Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yaitu melaksanakan survey kepada masyarakat yang menjadi pengguna jasa layanan. Penilaian mutu pelayanan terhadap penerbitan SLO dan LVHPI diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner terstruktur yang disebar

melalui link <http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/134>. Pada Triwulan II Tahun 2024 nilai IKM UPP Pangkalan PSDKP Bitung sebesar 84,66 kriteria “sangat memuaskan”. Nilai tersebut merupakan pengabungan nilai IKM SLO dan LVHPI dengan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang responden.

Tabel 24. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Per Layanan Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	SLO			LVHPI		
		NRR Per Unsur	NRR tertimbang per unsur	IKM per Unsur	NRR Per Unsur	NRR tertimbang per unsur	IKM per Unsur
1	Persyaratan	3,41	0,38	85,25	4,00	0,44	100
2	Prosedur	3,41	0,38	85,25	3,00	0,33	75
3	Waktu Pelayanan	3,45	0,38	85,25	3,00	0,33	75
4	Biaya/Tarif	3,27	0,36	81,75	3,00	0,33	75
5	Produk Layanan	3,27	0,36	81,75	3,00	0,33	75
6	Kompetensi Pelaksana	3,27	0,36	81,75	3,00	0,33	75
7	Perilaku Pelaksana	3,36	0,37	84	3,00	0,33	75
8	Sarana dan Prasarana	3,55	0,39	88,75	3,00	0,33	75
9	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	3,55	0,39	88,75	4,00	0,44	100
<b>Nilai Indeks (NI)</b>		<b>3,39</b>			<b>3,22</b>		
<b>Nilai IKM setelah dikonversi (NI x 25)</b>		<b>84,85</b>			<b>80,56</b>		
<b>Mutu Pelayanan</b>		<b>A</b>			<b>A</b>		
<b>Kategori</b>		<b>Sangat Memuaskan</b>			<b>Sangat Memuaskan</b>		

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp93.250.000 dan belum terdapat realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

## IKM 22. PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pengukuran capaian dilaksanakan tiap Triwulan dengan pola perhitungan rata-rata dengan menggunakan aplikasi *Coolaboration Office* melalui laman <http://portal.kkp.go.id>. Terdapat 2 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

1. Dokumen (20%), yaitu Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Rincian target IKU, Laporan Kinerja & Interim, Renaksi Kinerja;
2. Keaktifan (80%), yaitu Pimpinan Unit Eselon I-Staf. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam)

kali upload informasi sehingga minimal mendapatkan 3 (tiga) poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan, antara lain:

- Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;
- Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas/fungsi jabatan mendapatkan poin 1; dan
- Konten *video/campaign* diharapkan bersifat edukasi atau ajakan mendapatkan poin 3.

Penilaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan setiap triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Capaian indikator kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024 dari target triwulan sebesar 94 tercapai 130 dengan persentase capaian kinerja 120%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024 meningkat sebesar 37,41%. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 sebesar 120% telah tercapai, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni rata-rata capaian sampai Triwulan IV Tahun 2024.

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	92	92,59	100,64	94	130	120	94	130	120

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yaitu partisipasi aktif pimpinan dan ketua tim kerja lingkup Pangkalan

PSDKP Bitung dalam melakukan posting berita dan informasi pada aplikasi *Coolaboration Office* melalui laman <http://portal.kkp.go.id>.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dengan mengunggah berita dan informasi pada aplikasi *Coolaboration Office* yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung baik internal maupun melibatkan stakeholder dan instansi terkait. Pada Triwulan II Tahun 2024 jumlah berita dan informasi yang dipublikasi oleh 6 partisipan yaitu 1 (satu) orang pimpinan dan 5 (lima) orang Ketua Tim Kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebagai berikut:

Tabel 26. Partisipasi jumlah keaktifan publikasi berita dan informasi Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024

No	Partisipan	Jenis Konten yang dipublikasi		
		Dokumentasi	Karya Tulis	Video/ campaign
1	Pimpinan	6	2	3
2	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	4	3	1
3	Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan	8	-	-
4	Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	1	5	1
5	Ketua Tim Kerja Prasarana Saranadan Operasi Kapal Pengawas	5	-	2
6	Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran	3	-	3

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp627.500.000 dan realisasi Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp341.072.573 dengan presentase realisasi anggaran 50,05%.

### **IKM 23. TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 12,5%);

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III 2023 baik ke pengguna barang maupun pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedia usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan triwulan III Tahun 2022 (bobot 25%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Perhitungan capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp40.000.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp22.156.070 dengan presentase realisasi anggaran 55,39%.

#### **IKM 24. TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan PBJ merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ UPT Pangkalan PSDKP Bitung diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Unit UPT (bobot 10%);
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (bobot 15%);
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (bobot 10%);
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (bobot 45%);
5. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (bobot 5%); dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Tw I s.d. Tw III Tahun 2022 (bobot 15%).

Perhitungan capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp5.195.402.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp1.023.548.881 dengan presentase realisasi anggaran 19,70%.

## **IKM 25. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA merupakan instrumen dalam aktivitas evaluasi kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari:

- a. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (25%)
  1. Revisi DIPA (10%)
  2. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
- b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
  3. Penyerapan Anggaran (20%)
  4. Belanja Kontraktual (10%)
  5. Penyelesaian tagihan (10%)
  6. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
  7. Dispensasi SPM (5%)
- c. Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
  8. Capaian output (25%)

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: nilai IKPA  $\geq 95$  (Sangat Baik);  $89 \leq$  nilai IKPA  $< 95$  (Baik);  $70 \leq$  nilai IKPA  $<$

89 (Cukup); atau nilai IKPA >70 (Kurang). Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan pada periode semesteran dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024 dari target triwulan sebesar 83 tercapai 95,84 dengan persentase capaian kinerja 115,47%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024 meningkat sebesar 2,16 poin. Perbandingan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan II Tahun 2024 terhadap target Tahun 2024 sebesar 102,21% telah tercapai, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni rata-rata capaian sampai Triwulan IV Tahun 2024.

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

INDIKATOR KINERJA	TW II 2023			TW II 2024			Tahun 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	82	93,68	114,24	83	95,84	115,47	93,76	95,84	102,21

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yaitu penyusunan rencana penarikan dana serta melakukan revisi Hal III DIPA setiap triwulan, *monitoring* penyerapan anggaran secara periodik sesuai rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun, ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan setoran TUP, serta pengisian pelaporan data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dengan melaksanakan rapat pengendalian kinerja dan anggaran secara periodik, melakukan revisi DIPA untuk memenuhi perubahan anggaran terhadap kebijakan program/kegiatan Satker dan penyesuaian rencana penarikan dana setiap triwulan, melakukan pengusulan *revolving* GUP sebanyak 2 (dua) kali setiap bulan, pengusulan TUP untuk percepatan penyerapan anggaran dan pencapaian output kinerja dan meminimalisir pengembalian, serta

menyelesaikan pembayaran dan proses penyelesaian tagihan PT Pertamina untuk pembayaran BBM Kapal Pengawas.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp21.481.121.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp10.844.058.919 dengan presentase realisasi anggaran 50,48%.

## **IKM 26. NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Penilaian Kinerja Anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai Kinerja Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja dihitung berdasarkan nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja terkait. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilaksanakan untuk memperoleh informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Perhitungan nilai NKA dilakukan dalam periode Tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Pengukuran Evaluasi Kinerja Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

- a) capaian output bobot 43,5%, yaitu membandingkan antara realisasi volume RO dengan target volume RO;
- b) penyerapan anggaran bobot 9,7%, yaitu membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir;
- c) Efisiensi bobot 28,6%, yaitu membandingkan selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.
- d) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan bobot 18,2%, yaitu memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II Tahun 2024, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Alokasi anggaran Tahun 2024 untuk mendukung Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp55.000.000 dan realisasi Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp12.230.785 dengan presentase realisasi anggaran 22,24%.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu anggaran Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2024 berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA 032.05.2.440822/2024 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp55.883.290.000 terdiri dari 2 (dua) sumber pendanaan yaitu Rupiah Murni sebesar Rp47.166.421.000 dan PNBPNP sebesar Rp8.716.869.000. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terdapat penyesuaian rincian anggaran melalui proses revisi anggaran sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 sehingga nilai pagu anggaran revisi terakhir sebesar Rp54.645.190.000 (Rupiah Murni sebesar Rp45.928.321.000 dan PNBPNP sebesar Rp8.716.869.000). Terdapat pagu anggaran yang diblokir kode9 (*automatic adjustment*) sebesar Rp1.150.512.000 sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp53.494.678.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp19.439.711.395 dengan persentase realisasi anggaran 35,57%.

Tabel 28. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung s.d. Triwulan II Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Penyerapan
1	Pemantauan, Operasi Armada dan infrastruktur Pengawasan	25.373.464.000	6.518.811.746	18.854.652.254	25,69%
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.162.000.000	284.467003	877.532.997	24,48%
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	2.909.415.000	1.217.551.814	1.691.863.186	41,85%
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.831.000.000	836.651.117	994.348.883	45,69%
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	23.369.311.000	10.582.229.715	12.787.081.285	45,28%
<b>TOTAL</b>		<b>54.645.190.000</b>	<b>19.439.711.395</b>	<b>35.205.478.605</b>	<b>35.57%</b>

## IV. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Bitung berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen PSDKP, dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung sebagai penerima amanah yang menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian target kinerja Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II Tahun 2024 menghitung sebanyak 15 (lima belas) dari 26 (dua puluh enam) indikator kinerja dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,83 dengan kategori "baik". Terdapat 1 (satu) Indikator kinerja yang belum sesuai target pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu Indeks kinerja operasi speedboat pengawas.

### B. SARAN

Dalam rangka upaya peningkatan capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatkan capaian indeks kinerja operasi speedboat pengawas	Menyusun rencana operasi armada speedboat pengawas terutama SP Napoleon 30, RB Pangkep dan RB palopo
2	Meningkatkan nilai IKM pengguna layanan SLO dan LVHPI pada Pangkalan PSDKP Bitung	Melakukan sosialisasi pengisian IKM pada aplikasi SISUSAN KKP kepada pengguna layanan
2	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kegiatan yang rendah dalam pencapaian target output maupun realisasi anggaran	Rapat monitoring dan evaluasi kegiatan terhadap target dan capaian output serta realisasi anggaran secara periodik

## Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpsdkp@kkp.go.id](mailto:ditjenpsdkp@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA  
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Kepala Pangkalan Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Kurniawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN</b>				
SK.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	02	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		03	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	91
		04	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	05	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		06	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
<b>KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>				
SK.4	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	07	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100
SK.5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	08	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
<b>KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>				
SK.6	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	09	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
<b>KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
SK.7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	10	Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		11	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK.8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	12	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
<b>KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN PSDKP</b>				
SK.9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	13	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	75
		14	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
		15	Nilai pengawasan kearsiapan internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	70
		16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	82
		17	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	84
		18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	21
		20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Inovasi)	1
		21	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	80
		22	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	94
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	80		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		24 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	80
		25 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	93,76
		26 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	82

## Data Anggaran Tahun 2024

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan</b>	<b>26.611.564.000</b>
SK1.1	<i>Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK1.2	<i>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif</i>	
SK1.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
<b>Kegiatan 2</b>	<b>Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan</b>	<b>2.909.415.000</b>
SK2.1	<i>Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan</i>	
SK2.2	<i>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan</i>	
<b>Kegiatan 3</b>	<b>Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</b>	<b>1.831.000.000</b>
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan</i>	
<b>Kegiatan 4</b>	<b>Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1.162.000.000</b>
SK4.1	<i>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas</i>	
SK4.2	<i>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas</i>	
<b>Kegiatan 5</b>	<b>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>23.369.311.000</b>
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
<b>Total Anggaran</b>		<b>55.883.290.000</b>

Jakarta, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA  
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Kepala Pangkalan Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Kurniawan